

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN

Oleh

Nova Situmeang
NIM.2205040080

Abstrak

Penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan merupakan kelompok yang dinilai berbeda dari orang normal umumnya karena terlihat lemah baik secara fisik maupun mental hingga dianggap rentan terjadi diskriminasi di kalangan masyarakat, maka harus mendapatkan perlindungan khusus. Peradilan diharapkan untuk memastikan hak-hak warga negara Indonesia terlindungi dengan memberikan kemudahan akses keadilan, penegakan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan dalam rangka pemenuhan hak-haknya. Analisis tersebut difokuskan pada pelaksanaan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan telah dilaksanakan melalui penerapan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak atas akses keadilan, pendampingan, serta akomodasi yang layak dalam proses peradilan. Pelaksanaan perlindungan tersebut bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara dengan memberikan kemudahan akses terhadap aparat penegak hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, sehingga proses peradilan dapat berlangsung secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Kesimpulannya Implementasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bantuan Hukum, dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Namun sebagian, implementasi perlindungan hukum dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan aksesibilitas, belum optimalnya penyediaan pendamping, penerjemah bahasa isyarat, layanan psikologis, serta belum terpenuhinya hak korban atas pemulihan dan restitusi secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, karena pemenuhan hak korban masih lebih berorientasi pada proses penegakan hukum daripada pemulihan korban secara menyeluruh.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Korban Pemerkosaan.

LEGAL PROTECTION FOR PEOPLE WITH DISABILITIES AS INTELLIGENT VICTIMS

By
Nova Situmeang
2205040080

Abstract

Persons with disabilities who are victims of rape are considered a distinct group compared to the general population; perceived as physically and mentally vulnerable and susceptible to societal discrimination, they require special protection. The justice system is expected to safeguard the rights of Indonesian citizens by facilitating access to justice and ensuring law enforcement—both within and outside the courtroom. This study aims to analyze the implementation of legal protections for persons with disabilities who are rape victims, specifically regarding the fulfillment of their rights. The analysis focuses on the application of legal provisions governing victim protection. A normative legal research method with a descriptive-analytical approach was employed. The findings indicate that legal protection for persons with disabilities who are rape victims has been implemented through various statutory provisions guaranteeing the right to access justice, support services, and reasonable accommodation during judicial proceedings. This protection aims to ensure the fulfillment of citizens' constitutional rights by facilitating access to law enforcement officials—at the investigation, prosecution, and trial stages—thereby ensuring a fair, equitable, and non-discriminatory judicial process for persons with disabilities. In conclusion, the implementation of legal protections for persons with disabilities who are rape victims is grounded in statutory provisions covering child protection, the rights of persons with disabilities, legal aid, sexual violence offenses, reasonable accommodation in judicial proceedings, and criminal procedural law. This implementation spans the stages from investigation to trial, involving the provision of support services, legal aid, and reasonable accommodation, as well as upholding the victim's right to an equitable and non-discriminatory judicial process. These provisions are applied to guarantee the protection of victims' rights, legal certainty, and the realization of justice, while ensuring that persons with disabilities receive treatment appropriate to their specific needs throughout the criminal justice process.

Keywords: Legal Protection, Persons with Disabilities, Rape Victims.